

TESIS

**PENGGUNAAN *GIRIK* SEBAGAI ALAS HAK DALAM PENDAFTARAN
TANAH HAK MILIK PERTAMA KALI DI KABUPATEN BEKASI**

*Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan*



Dasman, S.H., M.Kn.

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

PENGUNAAN *GIRIK* SEBAGAI ALAS HAK DALAM PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK PERTAMA KALI DI KABUPATEN BEKASI

ABSTRAK

(Firstly Markhaputri, 1520122011, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 125 halaman, Padang, 2017)

Secara yuridis, *girik* sudah tidak dapat lagi dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah setelah lahirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. *Girik* merupakan surat bukti pajak atas tanah pada masa pemerintahan Kolonial yang berasal dari tanah adat yang hanya dapat dijadikan sebagai alas hak pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan konversi hak lama. Namun faktanya, sampai kurang lebih 57 tahun diberlakukannya peraturan tersebut, masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanah *girik*. Setidaknya menurut penyampaian keterangan oleh pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional/Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa setidaknya sampai dengan bulan April 2017, masih ada kurang lebih 40% bidang tanah yang belum terdaftar di Kantor BPN/ATR Kabupaten Bekasi. Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan tipe penelitian hukum empiris yang mengkaji materi-materi hukum serta permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yang terlibat langsung dengan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa *Pertama*, *girik* dibuat pada masa pemerintahan kolonial sebagai bukti atas pembayaran pajak tanah yang kemudian diakui pula sebagai bukti kepemilikan pada saat itu. *Kedua*, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang memegang *girik* saat ini yakni, mahalnya biaya, lamanya waktu pengurusan pendaftaran pertama kali, tidak adanya peraturan yang mewajibkan atau memberikan sanksi kepada masyarakat yang belum mau mendaftarkan tanahnya, serta masyarakat yang masih merasa aman dengan belum dilakukannya pendaftaran tanah merupakan alasan masih beredarnya *girik* di masyarakat. *Ketiga*, meskipun *girik* ditentukan sebagai alas hak pendaftaran tanah pertama kali, namun penyertaan *girik* tidak bisa menjadi satu-satunya syarat untuk melaksanakan proses pendaftaran tanah pertama kali. Artinya, *girik* menjadi tidak berkekuatan hukum apabila berdiri sendiri. Maka dari itu, untuk melaksanakan proses pendaftaran tanah pertama kali sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010, *girik* harus disertakan dengan *Letter C* Desa sebagai persyaratan tambahannya.

Kata Kunci: *Girik*, *Letter C*, Pendaftaran Tanah Pertama Kali

UTILIZATION OF *GIRIK* AS FOUNDATION OF RIGHT IN THE FIRST TIME OWNERSHIP RIGHTS LAND REGISTRATION IN BEKASI DISTRICT

ABSTRACT

(Firstly Markhaputri, 1520122011, Master of Notary, Faculty of Law Andalas University, 125 pages, Padang, 2017)

Juridically, *girik* can no longer be used as a proof of ownership of land rights after the enactment of Law No. 5 Year 1960 about Basic of Agrarian Law. *Girik* is a tax certificate of land during the reign of the Colonial which based on customary land that can only be used as foundation of right of the first time land registration based on the conversion of old rights. But in fact, until approximately 57 years of enactment of that regulation, there are still many people who have not registered land which based on *girik*. At least according to the submission of information by the employees of the National Land Agency/Agrarian and Spatial Planning Agency (BPN/ATR) of Bekasi District stated that at least until April 2017, there are still approximately 40% of land which not registered yet in the BPN/ATR Bekasi District. Research Methods which conducted by the author is a type of empirical legal research that examines the legal materials and social problems that occur in the society that directly involved with the social problems which related in this study. This research is a descriptive research that provides data about a condition or social phenomena that developed in the midst of society. Based on the results of this research, it can be seen that *First*, the *girik* issued during the colonial governmental as a proof of the land tax payment which after that also recognized as proof of ownership at that time. *Second*, there are several factors that cause there are number of people who still hold *girik* until now that is the high cost, the length of time first time land registration, the absence of regulations that require or sanction to people who have not register their land, and people who still feel safe with the absence of land registration is the reason of the existence of *girik* in the society. *Third*, although the *girik* is determined to be the foundation of rights, but the addition of *girik* can not be the only requirement to implement the first land registration process. It means, the *girik* becomes not enforceable when using by it only. Therefore, the implementation the first time land registration should be related with the Regulation of Head of National Land Agency No 1 Year 2010, the *girik* must be included with *Letter C Desa* as an additional requirement.

Keywords: *Girik*, *Letter C*, First Time Land Registration